RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022

INSPEKTORAT KOTA MAGELANG

P E M E R I N T A H K O T A M A G E L A N G
INSPEKTORAT
JL. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Magelang 56101
Telp. (0293) 3201485, Website : inspektoratmagelangkota.go.id;
Email :inspektoratmglkota@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022.

Rencana Kerja 2022 merupakan langkah atau upaya pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2022.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Magelang dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, serta dapat dijadikan acuan kerja selama 1 tahun ke depan dan pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Magelang, 3 Agustus 2021
PLT. INSPEKTUR KOTA MAGELANG
Pengawas Pemerintahan Madya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199703 1 007

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		4
1.4 Sistematika Penulisan		4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021		6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra		6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD		7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi		14
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD		14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		21
BAB III TUJUAN, SASARAN OPD		22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		22
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD		22
3.3 Program dan Kegiatan		23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		25
4.1. Tujuan dan Sasaran		25
4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022		25
4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2022		26
BAB V PENUTUP		29
5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut		29

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021		6
Tabel 2.2 Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang		7
TABEL 2.3 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 dan 2021		7
TABEL 2.4 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021		8
TABEL 2.5 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020		11
TABEL 2.6 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022		16
Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Magelang Tahun 2022		20
TABEL 4.1 Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Inspektorat Kota Magelang		25
TABEL 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju		26

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat:

a. program;

b. kegiatan;

c. lokasi; dan

d. kelompok sasaran,

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

(4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022; dan

e. BAB V : Penutup.

(2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2021 merupakan tahun peralihan dalam Periode RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 ke RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 serta peralihan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 ke Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, sehingga untuk penyusunan Renja PD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2022 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2020 sebagai bahan evaluasi kinerja. Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2021 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang.
2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.
3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian disahkan oleh Walikota melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Magelang memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu pada RPJMD Kota Magelang;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya ;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Magelang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab. Secara sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN OPD
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran
4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022
4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2022
BAB V PENUTUP
5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan RKPD Kota Magelang Tahun 2022, Inspektorat Kota Magekang mendukung sasaran daerah "Terciptanya Birokrasi yang bersih dan akuntabel". Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, lnspektorat Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Magelang didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana tabel berikut;

TABEL 2.1

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 & 2021

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021							Target 2022	Ket.
	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Realisasi 2021 Triwulan					
				I	II	III	IV		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Misi : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah								
	Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas								
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP	-

Tabel 2.2
Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	5	5
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100%
2.	Peningkatan pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	88%
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
		RATA-RATA CAPAIAN				96%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Inspektorat. Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dari program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 & 2021

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021						Realisasi 2020	Target 2021	Ket
	Program	Indikator	Realisasi 2021 Triwulan						
			I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	100%	100%	-	-	100%	87%	
		Persentase Aparat SPIP aktif	89,66%	89,66%	-	-	89,66%	80%	
		Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	0%	0%	-	-	100%	90%	
2	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	3	3	-	-	3	3	
		Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	90,48%	94,74%	-	-	100%	80%	
		Persentase APIP yang	90,48%	90,48%	-	-	100%	85%	

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021						Realisasi 2020	Target 2021	Ket
	Program	Indikator	Realisasi 2021 Triwulan						
			I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		bersertifikat penunjang meningkat							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	0%	0%	-	-	86,21%	90%	
		Penurunan kasus temuan LKPD	4	5	-	-	0	0	
4	Program Sinergitas Penerapan SPI	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	92,31%	82,44%	-	-	83,33%	55%	
		Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP	0,09%	0,09%	-	-	0,23%	5%	
		Persentase implementasi SPIP	89,66%	89,66%	-	-	89,66%	100%	

TABEL 2.4
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021

No.	**Kode Rekening**	**Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Pagu (Rp.)**	**Keuangan**		**Fisik**	
				Rp.	**%**	**Target**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	6.01.0.00.0.00.24	**Inspektorat**	**6.497.621.000**	**2.737.862.972**	**42,14%**	**69,06%**	**49,38%**
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**					
1	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000.000	6.235.000	12,47%	56,40%	50,00%
2	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10.000.000	1.800.500	18,01%	76,61%	50,00%
3	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 3	Reviu Laporan Kinerja	7.000.000	1.596.000	22,80%	100,00%	85,00%
4	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 4	Reviu Laporan Keuangan	25.000.000	4.969.500	19,88%	53,47%	55,00%
5	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	69.785.000	26.199.000	37,54%	54,74%	50,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**					

6	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 2 . 2.02 . 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000	3.251.000	21,67%	52,63%	50,00%
7	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 2 . 2.02 . 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10.000.000	1.425.000	14,25%	52,64%	50,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 3 . 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**					
8	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 3 . 2.01 . 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 3 . 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**					
9	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 3 . 2.02 . 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000	1.295.000	43,17%	55,00%	50,00%
10	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 3 . 2.02 . 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	78.577.000	8.748.000	11,13%	58,37%	50,00%
11	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 3 . 2.02 . 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	225.769.000	24.302.000	10,76%	51,34%	50,00%
12	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 3 . 2.02 . 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	92.750.000	4.044.500	4,36%	100,00%	40,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
13	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.01 . 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	840.000	42,00%	100,00%	70,00%
14	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.01 . 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0,00%	0,00%	20,00%
15	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.01 . 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	0,00%	100,00%	50,00%
16	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.01 . 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
17	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.01 . 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
18	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.01 . 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.425.000	71,25%	100,00%	50,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
19	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.02 . 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.327.621.000	2.478.938.563	46,53%	71,43%	57,00%
20	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.02 . 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.700.000	1.728.500	30,32%	60,25%	50,00%
21	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.02 . 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.950.150	97,51%	100,00%	100,00%
22	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.02 . 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	0	0,00%	0,00%	50,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
23	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.05 . 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.602.000	1.173.500	25,50%	57,24%	50,00%

	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
24	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.06 . 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.747.000	1.016.000	10,42%	71,82%	40,00%
25	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.06 . 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000	3.350.875	21,37%	52,04%	50,00%
26	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.06 . 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.724.000	2.021.500	11,41%	54,16%	40,00%
27	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.06 . 7	Penyediaan Bahan/Material	9.052.000	2.330.150	25,74%	49,71%	35,00%
28	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.06 . 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.680.000	8.420.200	61,55%	65,79%	51,00%
29	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.06 . 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.324.000	29.930.557	28,42%	51,73%	51,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
30	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.08 . 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.467.000	4.693.400	37,65%	53,35%	50,00%
31	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.08 . 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	43.838.685	36,53%	50,00%	52,00%
32	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.08 . 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.948.000	29.090.166	41,59%	58,01%	51,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
33	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.09 . 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.425.000	16.980.452	25,56%	54,05%	50,00%
34	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.09 . 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.770.000	12.393.774	16,14%	55,44%	54,00%
35	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.09 . 5	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	2.982.000	99,40%	100,00%	100,00%
36	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.09 . 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	6.465.000	29,39%	52,27%	56,00%
37	6.01 . 6.01.0.00.0.00. 24 . 1 . 2.09 . 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	4.429.000	40,26%	100,00%	70,00%
	T O T A L		**6.497.621.000**	**2.737.862.972**	**42,14%**	**69,06%**	**49,38%**

TABEL 2.5
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.02.01.01	**Inspektorat**	**2.356.025.000**	**2.275.561.286**	**96,58 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
	4.02 . 4.02.01.01 . 1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**					
1	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	2.725.500	90,85 %	100,00 %	100,00 %
2	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	64.600.000	58.114.644	89,96 %	100,00 %	100,00 %
3	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.074.000	7.016.000	53,66 %	100,00 %	100,00 %
4	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.483.000	65.649.800	98,75 %	100,00 %	100,00 %
5	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.176.000	55.850.869	96,00 %	100,00 %	100,00 %
6	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.513.000	11.512.500	100,00%	100,00 %	100,00 %
7	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.790.000	12.790.000	100,00%	100,00 %	100,00 %
8	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.439.000	3.427.900	99,68 %	100,00 %	100,00 %
9	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.730.000	1.728.000	99,88 %	100,00 %	100,00 %
10	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	900.000	899.000	99,89 %	100,00 %	100,00 %
11	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.890.000	40.887.659	99,99 %	100,00 %	100,00 %
12	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000	29.940.389	99,80 %	100,00 %	100,00 %
13	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	24.408.000	23.245.512	95,24 %	100,00 %	100,00 %
	4.02 . 4.02.01.01 . 2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**					
14	4.02 . 4.02.01.01 . 2 . 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75.000.000	74.843.000	99,79 %	100,00 %	100,00 %
15	4.02 . 4.02.01.01 . 2 . 10	Pengadaan mebeleur	55.658.000	55.373.000	99,49 %	100,00 %	100,00 %
16	4.02 . 4.02.01.01 . 2 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.393.000	4.371.000	99,50 %	100,00 %	100,00 %
17	4.02 . 4.02.01.01 . 2 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.745.000	60.258.469	90,28 %	100,00 %	100,00 %
18	4.02 . 4.02.01.01 . 2 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000	3.500.000	100,00%	100,00 %	100,00 %

19	4.02 . 4.02.01.01 . 2 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.792.000	20.792.000	100,00%	100,00%	100,00%
20	4.02 . 4.02.01.01 . 2 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000	3.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
	4.02 . 4.02.01.01 . 6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**					
21	4.02 . 4.02.01.01 . 6 . 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.653.000	10.653.000	100,00%	100,00%	100,00%
22	4.02 . 4.02.01.01 . 6 . 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.950.000	1.950.000	100,00%	100,00%	100,00%
23	4.02 . 4.02.01.01 . 6 . 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.446.000	3.443.300	99,92%	100,00%	100,00%
24	4.02 . 4.02.01.01 . 6 . 6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.398.000	5.398.000	100,00%	100,00%	100,00%
25	4.02 . 4.02.01.01 . 6 . 8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	9.995.000	9.993.400	99,98%	100,00%	100,00%
26	4.02 . 4.02.01.01 . 6 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.384.000	3.382.100	99,94%	100,00%	100,00%
	4.02 . 4.02.01.01 . 15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**					
27	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	251.490.000	228.162.393	90,72%	100,00%	100,00%
28	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	88.449.000	81.649.000	92,31%	100,00%	100,00%
29	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	212.998.000	212.996.800	100,00%	100,00%	100,00%
30	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 10	Review Laporan Keuangan	52.102.000	52.026.000	99,85%	100,00%	100,00%
31	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	42.065.000	39.919.486	94,90%	100,00%	100,00%
32	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	14.831.000	14.131.000	95,28%	100,00%	100,00%
33	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 25	Penyelesaian Kerugian Negara	66.511.000	66.511.000	100,00%	100,00%	100,00%
34	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	72.218.000	68.167.586	94,39%	100,00%	100,00%
35	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	25.366.000	22.651.000	89,30%	100,00%	100,00%
36	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	123.055.000	123.050.577	100,00%	100,00%	100,00%
37	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 37	Evaluasi LKJiP	38.925.000	36.025.000	92,55%	100,00%	100,00%
38	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	11.387.000	11.387.000	100,00%	100,00%	100,00%
39	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 43	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	164.508.000	164.337.879	99,90%	100,00%	100,00%
40	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 46	Survei Penilaian Integritas (SPI)	495.000	495.000	100,00%	100,00%	100,00%

41	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 47	Review Dana Alokasi Khusus	64.386.000	59.181.000	91,92 %	100,00 %	100,00 %
42	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 48	Pelaksanaan Pengawasan Probity Audit	92.216.000	92.202.000	99,98 %	100,00 %	100,00 %
	4.02 . 4.02.01.01 . 16	**Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**					
43	4.02 . 4.02.01.01 . 16 . 3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	14.765.000	14.165.000	95,94 %	100,00 %	100,00 %
44	4.02 . 4.02.01.01 . 16 . 6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	152.108.000	151.297.023	99,47 %	100,00 %	100,00 %
45	4.02 . 4.02.01.01 . 16 . 8	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	50.500.000	48.900.000	96,83 %	100,00 %	100,00 %
	4.02 . 4.02.01.01 . 17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**					
46	4.02 . 4.02.01.01 . 17 . 2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	17.480.000	15.879.500	90,84 %	100,00 %	100,00 %
47	4.02 . 4.02.01.01 . 17 . 10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35.150.000	35.025.000	99,64 %	100,00 %	100,00 %
48	4.02 . 4.02.01.01 . 17 . 11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	38.740.000	38.006.000	98,11 %	100,00 %	100,00 %
	4.02 . 4.02.01.01 . 18	**Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal**					
49	4.02 . 4.02.01.01 . 18 . 1	Inventarisasi Temuan Pengawasan	10.185.000	10.184.000	99,99 %	100,00 %	100,00 %
50	4.02 . 4.02.01.01 . 18 . 2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	83.850.000	82.239.000	98,08 %	100,00 %	100,00 %
51	4.02 . 4.02.01.01 . 18 . 3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	37.328.000	36.228.000	97,05 %	100,00 %	100,00 %
	T O T A L		**2.356.025.000**	**2.275.561.286**	**96,58 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Permasalahan/Kendala Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Magelang tahun 2020 antara lain :

1) Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal:
2) OPD/obrik masih kurang memahami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan;
3) Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
4) Belum optimalnya hasil pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);
5) Belum terintegrasinya Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
6) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas;

7) Masih kurangnya jumlah pegawai khususnya Auditor di Inspektorat Kota Magelang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kota Magelang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya lingkungan pengendalian, belum semua entitas mendapatkan pendampingan dan asistensi
   a. Saran perbaikan hasil evaluasi internal belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja oleh OPD
   b. Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi
   c. Belum optimalnya OPD dalam mengidentifikasi penilaian resiko
   d. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas maupun kuantitas
2. Belum maksimalnya kualitas pengawasan pada OPD, belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat
   a. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan di entitas
   b. Masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
   c. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas maupun kuantitas

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Partners untuk peningkatan Nilai SAKIP Komponen evaluasi Internal;
2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Magelang.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatitf dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar

penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. melakukan evaluasi perencanan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. mendukung penyelenggaraan sistem Infromasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, telah dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

TABEL 2.6

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
INSPEKTORAT				Rp 8.228.302.000		Rp 8.228.302.000		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	Rp 7.603.930.000	100 persen	Rp 7.603.930.000		
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Inspektorat Kota Magelang**	**Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	**100 persen**	**Rp 13.000.000**	**100 persen**	**Rp 13.000.000**	**Rp -**	**0%**
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Rp 3.000.000	2 dokumen	Rp 3.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 dokumen	Rp 2.000.000	2 dokumen	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Inspektorat Kota Magelang**	**Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan**	**100 persen**	**Rp 7.043.317.000**	**100 persen**	**Rp 7.043.317.000**	**Rp -**	**0%**

	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	30 orang	Rp 7.033.617.000	30 orang	Rp 7.033.617.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	12 laporan	Rp 5.700.000	12 laporan	Rp 5.700.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	Rp 2.000.000	1 laporan	Rp 2.000.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah laporan prognosis yang disusun	1 laporan	Rp 2.000.000	1 laporan	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Cakupan laporan (CLAK) administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**Rp 4.602.000**	**100 persen**	**Rp 4.602.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah laporan PAK	2 laporan	Rp 4.602.000	2 laporan	Rp 4.602.000	Rp -	0%
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Cakupan penyediaan (CPAU) administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**Rp 171.207.000**	**100 persen**	**Rp 171.207.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya	10 ruangan	Rp 9.747.000	10 ruangan	Rp 9.747.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian	30 orang	Rp 15.680.000	30 orang	Rp 15.680.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	10 jenis jenis	Rp 17.724.000	10 jenis jenis	Rp 17.724.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah jenis penyediaan kebersihan kantor	15 jenis	Rp 9.052.000	15 jenis	Rp 9.052.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	40 kunjungan	Rp 13.680.000	40 kunjungan	Rp 13.680.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	Rp 105.324.000	18 kegiatan	Rp 105.324.000	Rp -	0%

6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**Rp 192.609.000**	**100 persen**	**Rp 192.609.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah surat yang dikelola	1000 surat	Rp 12.467.000	1000 surat	Rp 12.467.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	4 rekening	Rp 120.000.000	4 rekening	Rp 120.000.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	3 orang	Rp 60.142.000	3 orang	Rp 60.142.000	Rp -	0%
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**Rp 179.195.000**	**100 persen**	**Rp 179.195.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	7 unit	Rp 66.425.000	7 unit	Rp 66.425.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	15 unit	Rp 76.770.000	15 unit	Rp 76.770.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah mebeleur yang dipelihara	3 unit	Rp 3.000.000	3 unit	Rp 3.000.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	32 unit	Rp 22.000.000	32 unit	Rp 22.000.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	Rp 11.000.000	1 unit	Rp 11.000.000	Rp -	0%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	92 persen	Rp 206.785.000	92 persen	Rp 206.785.000		
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase Entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan**	**92 persen**	**Rp 181.785.000**	**92 persen**	**Rp 181.785.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota	Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan	39 obrik	Rp 50.000.000	39 obrik	Rp 50.000.000	Rp -	0%

		Magelang							
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan	7 obrik	Rp 10.000.000	7 obrik	Rp 10.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	25 obrik	Rp 7.000.000	25 obrik	Rp 7.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	29 obrik	Rp 25.000.000	29 obrik	Rp 25.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti; Jumlah Temuan BPK	880 rekomendasi, 6 temuan	Rp 89.785.000	880 rekomendasi, 6 temuan	Rp 89.785.000	Rp -	0%
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase laporan penyelenggaraan PDTT yang tepat waktu**	**95 persen**	**Rp 25.000.000**	**95 persen**	**Rp 25.000.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditindaklanjuti	9 laporan	Rp 15.000.000	9 laporan	Rp 15.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	10 obrik	Rp 10.000.000	10 obrik	Rp 10.000.000	Rp -	0%
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	47,5 persen	Rp 417.587.000	47,5 persen	Rp 417.587.000		
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu**	**100 persen**	**Rp 6.220.000**	**100 persen**	**Rp 6.220.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dihasilkan	1 kebijakan	Rp 6.220.000	1 kebijakan	Rp 6.220.000	Rp -	0%
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase jumlah PD yang nilai SAKIPnya meningkat; Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev**	**16,67 persen; 15 persen**	**Rp 411.367.000**	**16,67 persen; 15 persen**	**Rp 411.367.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 laporan	Rp 3.000.000	10 laporan	Rp 3.000.000	Rp -	0%

	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 laporan	Rp 149.000.000	12 laporan	Rp 149.000.000	Rp -	0%
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi PPK	1 laporan	Rp 229.369.000	1 laporan	Rp 229.369.000	Rp -	0%
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 laporan	Rp 29.998.000	1 laporan	Rp 29.998.000	Rp -	0%

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021, Inspektorat memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja akuntabilitas kinerja dan keuangan, good governance, clean government dan pelayanan publik, serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya. Inspektorat akan menyempurnakan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat dan kondisi peraturan perundang-undangan jika mengalami perubahan dengan mengurangi ataupun menambah kegiatan yang sudah ada. Di tahun ini, Inspektorat tidak menambah kegiatan.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Magelang Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik visi Inspektorat Jenderal adalah : Inspektorat Jenderal melaksanankan visi Kementerian Dalam Negeri, yaitu: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk ;

1) Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi;
2) Melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang;
3) Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur;
4) Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan;
5) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota magelang dirumuskan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai atau yang dihasilkan yang dianggap mampu mendukung upaya pencapaian visi misi Inspektorat dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam RENSTRA 2021-2016, Inspektorat Kota Magelang telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi dengan merujuk pada penjabaran Misi Ketiga RPJMD Kota Magelang yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif" . Adapun Tujuan Inspektorat Kota Magelang dalam Renstra Inspektorat Kota Magelang adalah "Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif". Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat telah menetapkan 2 sasaran strategis yaitu:

1. Peningkatan nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal;
2. Peningkatan Maturitas SPIP;

Dalam mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator Inspektorat Kota Magelang yaitu;

1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal
2. Maturitas SPIP

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Magelang pada tahun 2022 adalah;

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga tetap harus mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 – 2016. Berikut ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator yang ditetapkan dalam rangka mendukung visi misi Walikota Magelang;

TABEL 4.1

Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Inspektorat Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif				
Tujuan: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif				
1.	Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	Angka	3,391
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	7,5
	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	75,75
		Kapabilitas APIP	Angka	3,16
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Angka	88

4.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra lnspektorat Kota Magelang dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja lnspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) lnspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2022

TABEL 4.2								
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju								
PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target Capaian
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Dana	
INSPEKTORAT				Rp 8.228.302.000		Rp 8.228.302.000		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 persen	Rp 7.603.930.000	100 persen	Rp 7.603.930.000		
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 13.000.000**	**100 persen**	**Rp 13.000.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	2 dokumen	Rp 3.000.000	2 dokumen	Rp 3.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kota Magelang	2 dokumen	Rp 2.000.000	2 dokumen	Rp 2.000.000	DAU	100%
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 7.043.317.000**	**100 persen**	**Rp 7.043.317.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Magelang	30 orang	Rp 7.033.617.000	30 orang	Rp 7.033.617.000	DAU	100%
	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Inspektorat Kota Magelang	12 laporan	Rp 5.700.000	12 laporan	Rp 5.700.000	DAU	100%
	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 2.000.000	1 laporan	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 2.000.000	1 laporan	Rp 2.000.000	DAU	100%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 4.602.000**	**100 persen**	**Rp 4.602.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Kota Magelang	2 laporan	Rp 4.602.000	2 laporan	Rp 4.602.000	DAU	100%

6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp**	**171.207.000**	**100 persen**	**Rp**	**171.207.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kota Magelang	10 ruangan	Rp	9.747.000	10 ruangan	Rp	9.747.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Magelang	30 orang	Rp	15.680.000	30 orang	Rp	15.680.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Kota Magelang	10 jenis jenis	Rp	17.724.000	10 jenis jenis	Rp	17.724.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Kota Magelang	15 jenis	Rp	9.052.000	15 jenis	Rp	9.052.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Magelang	40 kunjungan	Rp	13.680.000	40 kunjungan	Rp	13.680.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Magelang	18 kegiatan	Rp	105.324.000	18 kegiatan	Rp	105.324.000	DAU	100%
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp**	**192.609.000**	**100 persen**	**Rp**	**192.609.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Magelang	1000 surat	Rp	12.467.000	1000 surat	Rp	12.467.000	DAU	100%
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kota Magelang	4 rekening	Rp	120.000.000	4 rekening	Rp	120.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kota Magelang	3 orang	Rp	60.142.000	3 orang	Rp	60.142.000	DAU	100%
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp**	**179.195.000**	**100 persen**	**Rp**	**179.195.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Magelang	7 unit	Rp	66.425.000	7 unit	Rp	66.425.000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Magelang	15 unit	Rp	76.770.000	15 unit	Rp	76.770.000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Kota Magelang	3 unit	Rp	3.000.000	3 unit	Rp	3.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	32 unit	Rp	22.000.000	32 unit	Rp	22.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	1 unit	Rp	11.000.000	1 unit	Rp	11.000.000	DAU	100%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			92 persen	Rp	206.785.000	92 persen	Rp	206.785.000		
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**Inspektorat Kota Magelang**	**92 persen**	**Rp**	**181.785.000**	**92 persen**	**Rp**	**181.785.000**	**DAU**	**100%**

	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	39 obrik	Rp	50.000.000	39 obrik	Rp	50.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	7 obrik	Rp	10.000.000	7 obrik	Rp	10.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Magelang	25 obrik	Rp	7.000.000	25 obrik	Rp	7.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Magelang	29 obrik	Rp	25.000.000	29 obrik	Rp	25.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Magelang	880 rekomendasi, 6 temuan	Rp	89.785.000	880 rekomendasi, 6 temuan	Rp	89.785.000	DAU	100%
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		**Inspektorat Kota Magelang**	**95 persen**	**Rp**	**25.000.000**	**95 persen**	**Rp**	**25.000.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kota Magelang	9 laporan	Rp	15.000.000	9 laporan	Rp	15.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	10 obrik	Rp	10.000.000	10 obrik	Rp	10.000.000	DAU	100%
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			47,5 persen	Rp	417.587.000	47,5 persen	Rp	417.587.000		
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp**	**6.220.000**	**100 persen**	**Rp**	**6.220.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	1 kebijakan	Rp	6.220.000	1 kebijakan	Rp	6.220.000	DAU	100%
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		**Inspektorat Kota Magelang**	**16,67 persen; 15 persen**	**Rp**	**411.367.000**	**16,67 persen; 15 persen**	**Rp**	**411.367.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	10 laporan	Rp	3.000.000	10 laporan	Rp	3.000.000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Magelang	12 laporan	Rp	149.000.000	12 laporan	Rp	149.000.000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp	229.369.000	1 laporan	Rp	229.369.000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp	29.998.000	1 laporan	Rp	29.998.000	DAU	100%

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pangawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat. Kaidah Pelaksanaan Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan resiko OPD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing OPD yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih sehingga dapat mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintahan Kota Magelang.

Rencana Tindak Lanjut pada Inspektorat Kota Magelang adalah:

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan;
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat Daerah Kota Magelang;
3. Meningkatkan Kapasitas SDM melalui diklat, PKS (pelatihan Kantor Sendiri), maupun webinar serta Pengelolaan SDM yang Optimal dalam rangka mewujudkan SDM yang Adaptif dan Technology Savvy (mengerti teknologi);
4. Meningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kelancaran pengawasan melalui Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan;

5. Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan;
6. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern;
7. Pemenuhan Kebutuhan SDM pengawasan dengan kebijakan Rekrutmen dan impassing;

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Plt.INSPEKTUR KOTA MAGELANG
Pengawas Pemerintahan Madya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199703 1 007

Dipindai dengan CamScanner